LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 48 TAHUN 2022
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID
KANTOR KECAMATAN MALILI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUANSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KANTOR KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Informasi	Dasar Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Biodata Elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28a s/d h - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
3.	Konfigurasi Database dan aplikasi serta username dan password	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30 – 37 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat menimbulkan tindakan criminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi/mengamnakan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses	Selama aplikasi masih digunakan
4.	Data identitas pengadu atau palapor	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Tidak terbatas

5.	Dokumen Laporan Keuangan / Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) beserta lampirannya yang belum diaudit oleh BPK	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP No. 61 Tahun 2010 tentang KIP Pasal 3	Dapat terjadi penyalahgunaan Laporan Keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	- Memperlancar proses Pemeriksaan oleh BPK - Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik	Sampai keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
6.	Hasil Monitoring dan Evaluasi APBdes	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - Perturan Bupati Luwu Timur No. 14 Tahun 2021 tentang Tata cara pembagian, penetapan dan penggunaan Dana Desa	Mengganggu proses kegiatan monev dan pengambilan kebiajakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak terbatas
7.	Dokumen kepemilikan Tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 86	- Mengungkap data pribadi pemilik tanah - Disalahagunakan oleh oknum yg mencari keuntungan / tidak bertanggung jawab	- Menjaga kerahasiaan data pemilik tanah - Mencegah terjadinya peyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 04 Juli 2022
CAMAT MALILI

NASIR, SP. M.Si
Pangkat - Pembina
NIP. 19811116 201001 1 015